

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
2. Dana perimbangan yang meliputi: dana bagi hasil, dana alokasi umum; dan dana alokasi khusus; dan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan,

dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Wali kota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah (PERDA) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia).

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut (Nurillah, 2014). Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga (Nurillah, 2014).

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi - fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran - keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes). Sumber daya manusia sebagai pilar penyangga utama dan penggerak roda suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi yang akan dicapai (Yosefrinaldi, 2013).

Kompetensi terdiri dari atas 5 (Lima) Karakteristik yaitu :

- a. *Knowledge*. Informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan (knowledge) merupakan kompetensi yang kompleks. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi pegawai yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor produksi yang lain akan diperbuat oleh pegawai berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan organisasi.
- b. *Skills* adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi maka perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya.
- c. *Self - Concept* adalah sikap dan nilai – nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.
- d. *Traits* adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan atau daya tahan.
- e. *Motives* adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya seseorang yang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan – tujuan

yang memberi suatu tantangan pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan semacam “feedback“ untuk memperbaiki dirinya.

Peningkatan kualitas sumber daya pegawai menjadi sangat *urgent* dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Sasaran dari pengembangan kualitas sumber daya pegawai adalah untuk meningkatkan kinerja operasional pegawai dalam melaksanakan tugas. Selain itu, kualitas sumber daya pegawai yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas. (<https://studikita.wordpress.com/2016/05/09/kompetensi-sumber-daya-manusia/>)

2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.

Akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas PEMDA (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal PEMDA. Pihak-pihak eksternal terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), investor, kreditur dan donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Sujarweni, 2015:158).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) baik pemerintah pusat maupun PEMDA, sudah harus menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam, penelitian terdahulu Ihsanti (2014), dan Herawati (2014) mengukur penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan indikator PP No.71 Tahun 2010 dengan melihat apakah PP tersebut sudah diterapkan dalam instansi atau tidak. Dengan demikian maka, penerapan SAKD dapat disimpulkan, dan dilihat dari :

- a. Penerapan sistem akuntansi sudah mengacu pada PP No.71 Tahun 2010.
- b. Proses akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah (Sujarweni, 2015: 158-160)

2.1.4 Teknologi Informasi

Dalam penjelasan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan pemerintah dan pemda berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.

Teknologi informasi adalah teknologi yang fungsinya digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan menyusun, menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas di mana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Sutabri, 2014:3).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Haza, 2015). Sehingga, teknologi informasi dapat membantu para penyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang baik serta mengumpulkan dokumen-dokumen untuk membuat laporan keuangan tersebut. Menurut Sutabri (2014:4), terdapat

tiga komponen utama teknologi informasi, yaitu: Perangkat Keras (*Hardware*), Perangkat Lunak (*Software*), dan Orang (*Brainware*).

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian internal adalah suatu proses, dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan dalam kategori yang diantaranya: Efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan dalam pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan hukum yang berlaku dan peraturan (Karmila,dkk:2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pengendalian internal menurut Marda (2013) sesuai dengan definisi AICPA yaitu:

- a) Menjaga harta kekayaan milik instansi,
- b) Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi,
- c) Meningkatkan efisiensi operasional,
- d) Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di adaptasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 termasuk:

1. Lingkungan pengendalian, pimpinan lembaga pemerintah dan semua karyawan harus membuat serta memelihara lingkungan organisasi untuk memimpin keseluruhan organisasi demi perilaku positif dan dukungan untuk kontrol internal, serta manajemen yang baik.
2. Penilaian Risiko, pengendalian internal yaitu harus memberikan penilaian risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar dan dari dalam, terdiri dari kegiatan berikut:
 - Identifikasi risiko.
 - Analisis risiko.

- Kegiatan pengendalian, yang membantu memastikan bahwa kegiatan yang dipimpin dan dilaksanakan instansi pemerintah telah diimplementasikan, kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur berkaitan dengan posisi keuangan serta transaksi - transaksi yang dilaksanakan oleh suatu entitas pelaporan (Armel et al., 2017). Laporan keuangan dijadikan sebagai sarana dalam mencapai tujuan serta dalam pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban suatu entitas (Mokoginta et al., 2017).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Ihsanti, 2014).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan No.1 Penyajian Laporan Keuangan tentang Komponen - Komponen Laporan Keuangan pada paragraf 14 menyatakan bahwa Komponen - komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*Anggaranary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Kerangka Konseptual paragraf 35-40 tentang Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran - ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

(a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

(b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Dapat di verifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

(c) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

(d) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel. 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis/ Model	Kesimpulan Hasil
1	Wati, Herawati dan Sinarwati (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	<i>Purposive sampling</i> . Penentuan sampel untuk setiap SKPD menggunakan metode proporsional. Sampel sebanyak 195.	Analisis data menggunakan regresi berganda dengan bantuan <i>software SPSS V19</i>	Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
2	Mahayani, Sulindawati dan Dewi (2017)	Pengaruh Kualitas SDM Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan	untuk mengetahui pengaruh kualitas SDM bidang akuntansi, sistem pengendalian	Kualitas SDM Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi	Penelitian ini dilakukan pada 23 koperasi simpan pinjam dan Sampel penelitian	Teknik pengumpulan data dengan metode kuesioner dan analisis regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas SDM Bidang Akuntansi, Sistem

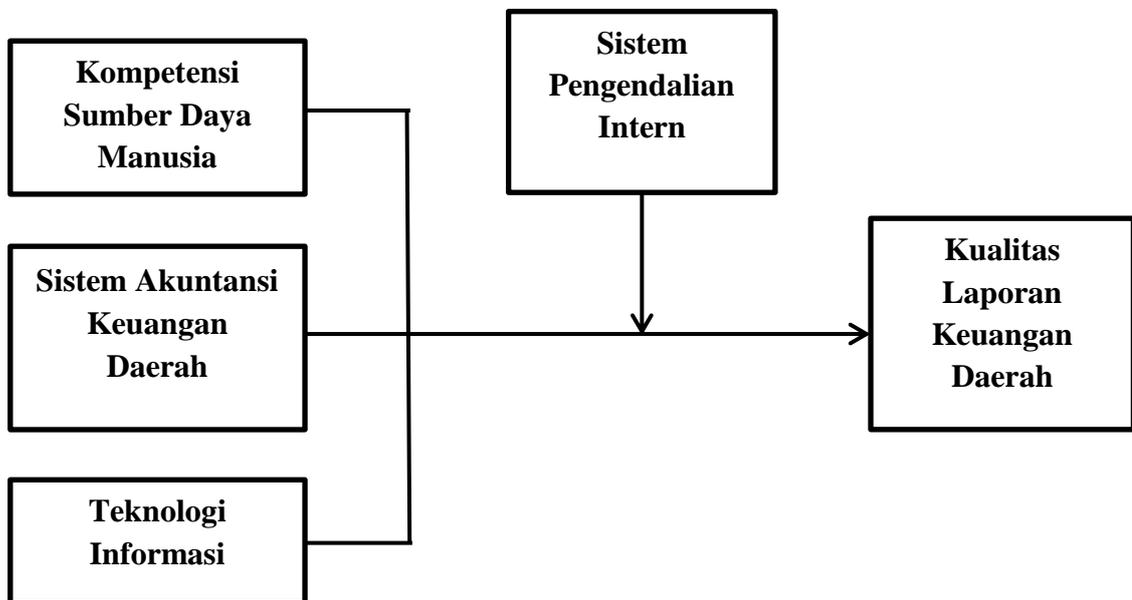
		Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana)	n internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana	Informasi	ini berjumlah 64 pegawai yang bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana.	linier berganda, uji T dan koefisien determinasi (R ²) yang diolah dengan bantuan SPSS 42.0 <i>for Windows</i> .	Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3	Kiranayanti dan Erawati (2016)	Pengaruh SDM, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah	untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung	Sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual	Kuesioner disampaikan kepada 108 pegawai SKPD Kabupaten Badung yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan, sebanyak 108 kuesioner (100%) kembali diisi dengan lengkap dan dapat diolah	Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program <i>software</i> SPSS. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

							pemerintah daerah.
4	Hasanah, Sasongko dan Bawono (2019)	Pengaruh pemahaman akuntansi, penerapan SAKD, peran internal audit dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi pada SKPD di pemerintah Kabupaten Sukoharjo)	untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.	Pemahaman akuntansi, penerapan SAKD, peran internal audit dan penerapan SAP	Responden dalam penelitian ini adalah pejabat penatausahaan keuangan - SKPD (PPK - SKPD) dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan - SKPD (Pembantu PPK - SKPD) fungsi akuntansi.	Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, dan penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5	Yusrawati dan Andini (2015)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Empat	untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Penelitian ini dilakukan di 14 Dinas dari 27 SKPD yang berada di Kabupaten Empat Lawang	Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Berganda.	Kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada

		Lawang Sumatera Selatan	kualitas laporan keuangan daerah.				SKPD Kabupaten Empat Lawang.
--	--	-------------------------	-----------------------------------	--	--	--	------------------------------

2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 2.1. Model Konseptual Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga (Nurillah, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soimah (2014) yang berjudul pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Roviyantie (2011) menemukan hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah.

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2.4.2 Sistem akuntansi keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri no.59 Tahun 2007).

Dalam, penelitian terdahulu Ihsanti (2014), dan Herawati (2014) mengukur penerapan SAKD dengan indikator PP No.71 Tahun 2010 dengan melihat apakah PP tersebut sudah diterapkan dalam instansi atau tidak. Dengan demikian maka, penerapan SAKD dapat disimpulkan, dan dilihat dari :

- Penerapan sistem akuntansi sudah mengacu pada PP No.71 Tahun 2010.
- Proses akuntansi di SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah (Sujarweni, 2015: 158-160).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAK, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014) menyatakan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2.4.3 Teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Dalam penjelasan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan pemerintah dan pemda berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.

Teknologi informasi adalah teknologi yang fungsinya digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan menyusun, menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas di mana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Sutabri, 2014:3).

Menurut Suparman, dkk (2014) menghasilkan pengujian hipotesis yang menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan:

H₃ : Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2.4.4 Sistem pengendalian intern mempengaruhi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai (Mahmudi, 2011) Jadi sistem pengendalian intern merupakan faktor eksternal (*eksternal side*) yang dirancang untuk memudahkan pegawai mencapai tujuan organisasi. Sukirman (2013) menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi mampu berinteraksi dengan kapasitas SDM dalam meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengembangkan hipotesis:

H₄ : Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2.4.5 Sistem pengendalian intern mempengaruhi hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri no.59 Tahun 2007). Maka dapat diasumsikan bahwa sistem pengendalian intern dapat memperkuat hubungan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H₅ : Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh positif sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2.4.6 Sistem pengendalian intern mempengaruhi hubungan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Sukirman (2013) menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi mampu berinteraksi dengan kapasitas SDM dalam meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Melalui dukungan sistem pengendalian intern yang memadai, penerapan sistem informasi keuangan daerah akan lebih optimal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Sukirman (2013) membuktikan secara empiris pengendalian intern akuntansi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengembangkan hipotesis:

H₆ : Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh positif teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

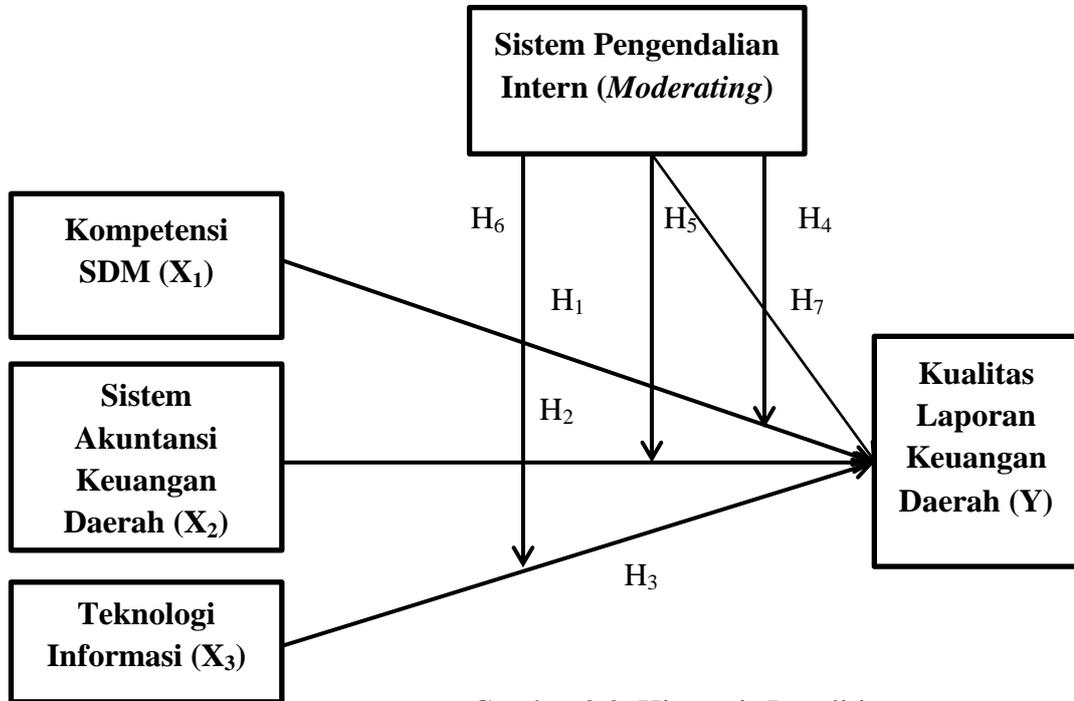
2.4.7 Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pengendalian internal adalah suatu proses, dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan dalam kategori yang diantaranya: Efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan dalam pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan hukum yang berlaku dan peraturan (Karmila,dkk:2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati (2016) menyatakan bahwa Kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Badung. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan:

H₇ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Adapun hipotesis penelitian ini disajikan pada gambar 2.2:



Gambar 2.2. Hipotesis Penelitian

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₂: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₃: Teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₄: Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₅: Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh positif sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₆: Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh positif teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₇: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah